



### Siaran Pers

## **Otoritas Jasa Keuangan dan Persyarikatan Muhammadiyah Bangun Kemitraan Strategis di Bidang Keuangan**

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad dan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin menandatangani Nota Kesepahaman yang menandai kemitraan strategis di Bidang Keuangan. Muliaman menyampaikan bahwa kemitraan strategis dengan Muhammadiyah mencakup aspek **Ekonomi Syariah, Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.**

Sejalan dengan itu, Din Syamsudin menyambut baik langkah OJK membina hubungan baik dengan Muhammadiyah yang memiliki infrastruktur dan sarana serta idealisme yang mendukung ruang lingkup atas Nota Kesepahaman yang ditandatangani bersamaan dengan wisuda Universitas Muhammadiyah Malang di Malang pada hari Sabtu 23 Februari 2013. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini terdiri atas 4 (empat) hal strategis yaitu (1) **Pengembangan ekonomi syariah; (2) Peningkatan literasi keuangan; (3) Perlindungan konsumen; dan (4) Sosialisasi.**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya adalah lembaga yang melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Sementara Muhammadiyah merupakan persyarikatan dan gerakan Islam yang bergerak dalam bidang da'wah, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Keduanya memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya pengembangan kegiatan ekonomi berbasis syariah, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Selain itu OJK menjadikan Nota Kesepahaman ini sebagai implementasi dari Nilai-nilai Strategis OJK yang terdiri dari (1) Integritas (2) Profesionalisme (3) Sinergi (4) Inklusif dan (5) Visioner.

Dalam orasi ilmiahnya pada wisuda sarjana ke 67 periode I tahun 2013 di UMM tersebut, Ketua OJK Muliaman D Hadad mengatakan bahwa secara empiris penguatan sistem keuangan dan pertumbuhan kemakmuran masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat.

Oleh karena itu ia memandang perlunya penyediaan akses keuangan terutama kepada *productive poor* secara luas agar kemakmuran masyarakat makin meningkat dan sistem keuangan semakin kuat.

Menurut Muliawan, pencapaian perluasan keuangan (*financial inclusion*) untuk mengentaskan kemiskinan memerlukan keseriusan, dukungan dan partisipasi semua pihak. Oleh sebab itu, ia sangat mendukung dan memberikan apresiasi atas kerjasama PP Muhammadiyah melalui penandatanganan MOU untuk mendukung OJK dalam melaksanakan salah satu peran dan fungsinya mendorong *financial inclusion* agar kemakmuran masyarakat makin luas dan meningkat.

Malang, 23 Februari 2013